



**KUDETA MILITER FILIPINA TERHADAP
PRESIDEN CORAZÓN AQUINO
1986-1990**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sastra

Oleh
DAVID INDRA KUSUMA
NIM 100110301030

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**KUDETA MILITER FILIPINA TERHADAP
PRESIDEN CORAZÓN AQUINO
1986-1990**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sastra

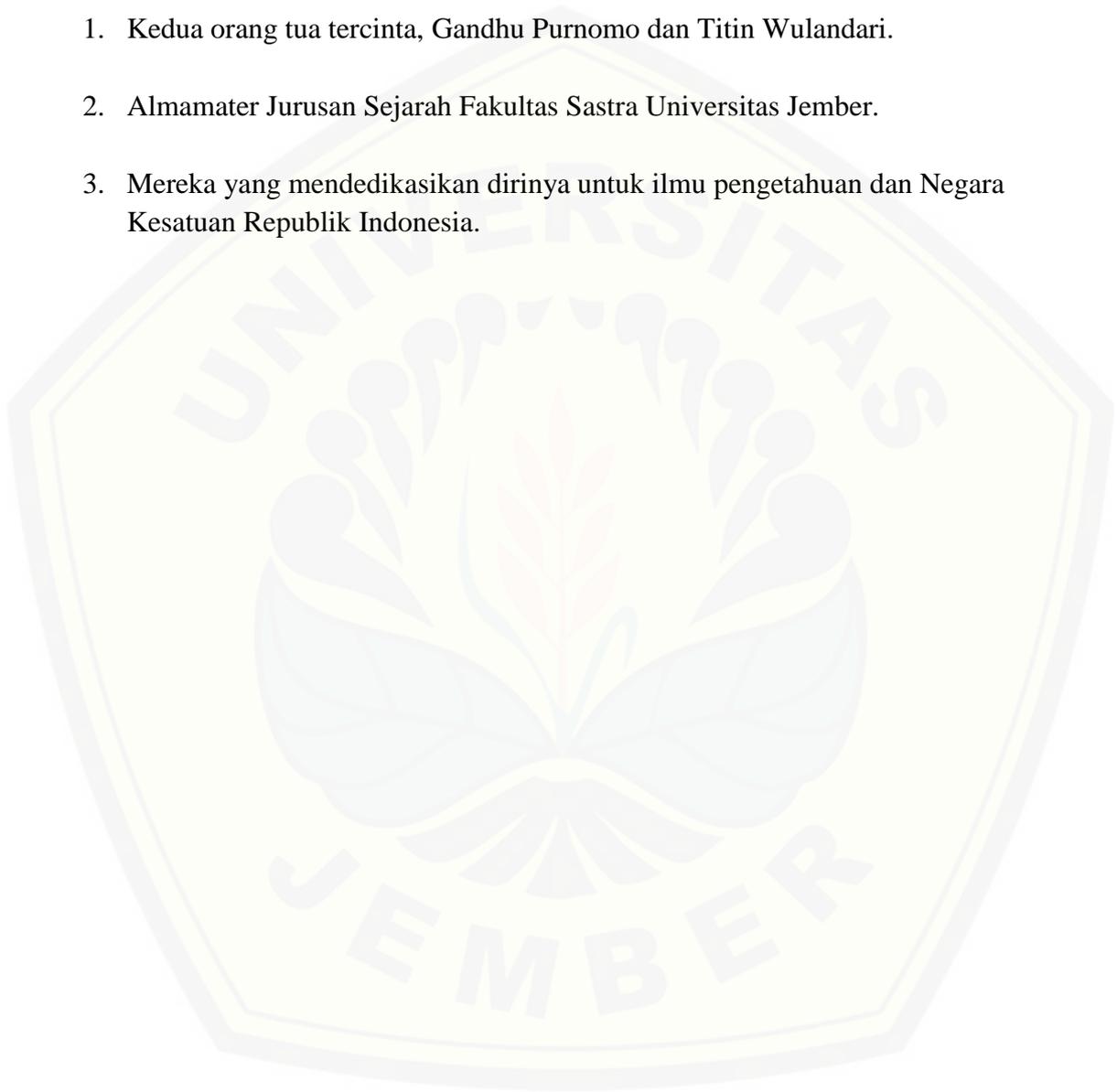
Oleh
DAVID INDRA KUSUMA
NIM 100110301030

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Gandhu Purnomo dan Titin Wulandari.
2. Almamater Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.
3. Mereka yang mendedikasikan dirinya untuk ilmu pengetahuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
BAB 3 METODOLOGI	
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	22
3.2 Pendekatan dan Kerangka Teoretis	24
3.3 Metode Penelitian	27
3.4 Sistematika Penulisan	32
BAB 4 PEMBAHASAN	
4.1 Karakteristik Militer Filipina	35
4.2 Hubungan Sipil-Militer di Filipina	46
4.3 Terbentuknya Angkatan Bersenjata Filipina	49
4.4 Mengatasi Pemberontakan Dalam Negeri	53
4.5 keadaan Militer Filipina Pada Masa Pemerintahan Marcos	57
4.6 Undang-Undang Darurat Perang Tahun 1972	61
4.7 Penyalahgunaan Fungsi Militer	68

4.8 Jatuhnya Ferdinand Marcos dan Naiknya Corazón Aquino	74
4.9 Faktor Eksternal dan Internal	87
A. Sikap Corazón Aquino terhadap Militer	87
B. Permasalahan Internal Militer Filipina	93
4.10 Kronologi Kudeta	99
A. Plot Hotel Manila (6 Juli 1986)	99
B. Plot <i>God Save the Queen</i> (11 November 1986)	104
C. Peristiwa GMA-7 (22-27 Januari 1987)	107
D. Peristiwa <i>Black Saturday</i> (18 April 1987)	111
E. Plot MIA/Manila <i>International Airport</i> (Juli 1987)	114
F. Kudeta Agustus 1987 (28 Agustus 1987)	119
G. Kudeta Desember 1989 (1-7 Desember 1989)	132
H. Kudeta Maret 1990 (4 Maret 1990)	141
I. Kudeta Oktober 1990 (4 Oktober 1990)	144
4.11 Dampak Kudeta	149
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	164
DAFTAR PUSTAKA	170

ABSTRAK

Skripsi ini membahas kudeta yang terjadi di Filipina saat masa kepresidenan Cory Aquino. Kudeta terjadi karena ketidakharmonisan hubungan sipil–militer di Filipina. Angkatan bersenjata Filipina tidak satu komando dalam mendukung pemerintahan sipil. Sebagian militer masih loyal pada mantan presiden Ferdinand Marcos, sementara pihak lainnya berseberangan dengan Presiden Cory Aquino karena perbedaan pandangan dalam masalah pertahanan, khususnya penanganan gerilyawan komunis. Kedua kelompok tersebut secara silih–berganti melancarkan upaya kudeta terhadap pemerintah, namun selalu dapat digagalkan oleh militer yang setia. Presiden Cory Aquino dalam peran sebagai Panglima Tertinggi tidak secara menyeluruh menyelesaikan faktor–faktor pemicu dalam angkatan bersenjata, sehingga kudeta cenderung terus berulang. Permasalahan dikaji dengan metode sejarah yang dikombinasikan dengan teori penggulingan kekuasaan. Situasi pra–kudeta dianalisis dengan memetakan kondisi militer Filipina sebelum Cory Aquino berkuasa, dimana militer sempat diberikan peran diluar fungsi pertahanan. Hal tersebut terjadi secara berlarut-larut dan menyebabkan profesionalisme militer Filipina menurun. Kudeta yang terjadi berulang–ulang menyebabkan gangguan terhadap pembangunan negara Filipina, khususnya di sektor perekonomian karena timbul rasa tidak aman.

Kata kunci: kudeta, militer, Filipina.

ABSTRACT

This thesis discusses the coup attempt that occurred in the Philippines during the presidency of Cory Aquino. The coup happened because of the disharmony of civil-military relations in the Philippines. The armed forces of the Philippines were not under a single command to support the civilian government. Another group in the military was still loyal to former president Ferdinand Marcos, while a reformist officer group was opposite to President Cory Aquino because of different perspectives on defense issues, especially about communist rebellion. Both groups launched multiple coup attempts against the government, but they were always defeated by loyalist soldiers. President Cory Aquino, in his role as Commander in Chief, did not totally solve the trigger factors in the armed forces, which made the coup attempt have a tendency to repeat. The problem was analyzed using a historical method that combined it with overthrowing theory. The pre-coup season was analyzed by mapping the condition of the Philippine military before Cory Aquino ruled, when the military was deployed as a non-defense role. This happened continuously and made them lack of professionalism. The repeated coup attempts caused damage to Philippine development, especially in the economic sector, which became insecure.

Keywords: coup, military, Philippines.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 16 Maret 1521 ekspedisi Spanyol di bawah pimpinan Ferdinand Magellan mendarat di gugusan kepulauan sebelah barat Pasifik.¹ Kedatangan ekspedisi Magellan merupakan pertama kalinya orang Eropa mendarat di kepulauan tersebut. Pada tanggal 2 Februari 1543, sebuah ekspedisi Spanyol lain yang di pimpin Ruy López de Villalobos mendarat di kepulauan yang sama. Ekspedisi Villalobos memberi nama bagi dua pulau di gugusan kepulauan tersebut, yakni Samar dan Leyte dengan nama Filipina. Pemilihan nama tersebut diambil dari nama raja Spanyol, Phillip II.² Di kepulauan ini penjelajah Spanyol tidak menemukan organisasi politik yang dapat dikenali atau kekuatan lainnya. Di daerah tersebut tidak ada kelompok elit, tidak ada istana, tidak ada penaklukan militer, sehingga tidak ada kelompok yang memerintah atas wilayah besar yang didiami ribuan orang tersebut.³

¹ José S. Arcilla, *Pengantar Sejarah Filipina* (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma, 2000), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 8.

³ Alden Cutshall, *The Philippines, Nation of Islands* (New Jersey: D. Van Nostrand Company, Inc., 1964), hlm. 11.

Pada bulan Mei 1565, Miguel Lopez de Legaspi ditunjuk sebagai gubernur oleh pemerintah Spanyol dan mendirikan pemukiman di Cebu. Sebagian besar kekuatan Legaspi kemudian di transfer ke Panay dan Manila, sebuah desa yang dikelilingi pagar barikade dari bambu. Pada tahun 1671 Manila menjadi pusat kegiatan administratif di Filipina.⁴ Kolonisasi Spanyol berakhir pada 13 Agustus 1898 setelah tentara Spanyol kalah dalam pertempuran melawan Amerika Serikat dan Tagalog. Penyerahan Spanyol secara *de jure* kepada Amerika Serikat terjadi pada 8 Desember 1898 melalui Perjanjian Paris.⁵ Dengan demikian Filipina berubah status menjadi koloni Amerika Serikat.

Amerika Serikat menjalankan kolonisasinya tidak dengan cara tradisional, namun dengan propaganda bahwa mereka akan “mendidik” bangsa Filipina. Amerika Serikat berencana mempersiapkan Filipina agar memiliki pemerintahan sendiri sehingga siap untuk kemerdekaan sesungguhnya.⁶ Upaya merintis kemerdekaan tersebut dikacaukan oleh invasi Jepang pada tanggal 8 Desember 1941, yang membuat Filipina menjadi arena Perang Dunia II. Dalam waktu relatif singkat, Jepang dapat menguasai Filipina setelah memenangkan Pertempuran Corregidor yang memaksa kekuatan Amerika Serikat menyerah tanpa syarat pada tanggal 6 Mei 1942.⁷ Perkembangan Perang Dunia II mengarah pada kemunduran kekuatan Jepang dan akhirnya pihak Amerika Serikat dapat memaksa Jepang menyerah tanpa syarat pada 2 September 1945. Situasi tersebut membawa dampak pada nasib Filipina, pada tanggal 27 Februari 1946 Jenderal Douglas Mac Arthur mewakili pihak Amerika Serikat menyerahkan kedaulatan Filipina kepada perwakilan bangsa Filipina, Sergio Osmena.⁸

Filipina kemudian mengadopsi model pemerintahan ala Amerika Serikat dalam menyelenggarakan negara. Badan legislatif Filipina adalah Kongres yang terdiri atas

⁴ *Ibid.*

⁵ José S. Arcilla, *op.cit.*, hlm. 112-113.

⁶ *Ibid.*, hlm. 118.

⁷ *Ibid.*, hlm 138-140.

⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

Senat dan *House of Representatives*, model ini sama dengan yang dianut Amerika Serikat.⁹ Pengaruh lain dapat dilihat pada bidang pertahanan, khususnya pada pembentukan angkatan bersenjata Filipina, AFP (*Armed Forces of the Philippines*). Pada tahun 1946, berdasarkan *The Philippine Rehabilitation Act 1946* Filipina mendapatkan bantuan senilai US \$ 100 juta berupa surplus properti militer dari Amerika Serikat. Properti militer dimaksud diantaranya kendaraan militer, kapal-kapal kecil dan kapal pendarat (*landing craft*), pesawat tempur eks *US Air Force*,¹⁰ kendaraan operasional bandara, seragam dan sejumlah peralatan medis. Pada tahun 1947, berdasarkan *The Philippine Military Assistance Agreement* dibentuk sebuah lembaga penasihat militer bernama JUSMAG (*Joint United States Military Advisory Group*). Personel militer Amerika yang tergabung dalam JUSMAG menyediakan dana, material dan panduan guna melatih dan mengembangkan angkatan bersenjata Filipina. Anggaran yang disediakan sebesar US \$ 20 juta dan bertambah US \$ 47 juta pada masa Ramon Magsaysay menjabat presiden.¹¹

Amerika Serikat juga membuka peluang bagi perwira-perwira terbaik Filipina untuk belajar di sekolah militer Negeri Paman Sam, misalnya di *United States Military Academy* (USMA) di West Point. Pendidikan militer gaya Amerika sedikit banyak mempengaruhi sikap dan perilaku perwira yang bersangkutan. Salah satu hasil pendidikan ala Amerika yang mempengaruhi perwira Filipina adalah *West Point Tradition*,¹² sebuah doktrin yang mewajibkan militer tunduk pada konstitusi negara.

⁹ Library of Congress - Federal Research Division, *Country Profile: Philippines*, Maret 2006, hlm. 19. Diunduh dari <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Philippines.pdf> diakses pada 19 Juli 2014 pukul 20.43 WIB.

¹⁰ Hibah pesawat tempur eks *US Air Force* pada tahun 1946 adalah anakronistik karena Amerika Serikat baru mengaktifkan angkatan udara per 18 September 1947. Penjelasan resmi dapat dilihat *USAF Missions Part Two: Air Power Comes of Age in World War II* [online] dalam <http://www.airforce.com/learn-about/history/part2/> diakses pada 20 Maret 2015 pukul 19.00 WIB.

¹¹ Alden Cutshall, *The Philippines, Nation of Islands* (New Jersey: D. Van Nostrand Company, Inc., 1964), hlm. 21-22.

¹² Salim Said, "Tentara: Resah, tapi Lemah" dalam *Tempo*, 1 Maret 1986, hlm. 22.

Konstitusi Filipina mengamanatkan bahwa militer berada di bawah supremasi sipil. Hal ini termuat secara jelas dalam Konstitusi Filipina 1973, yang berbunyi “*Civilian authority is at all times supreme over the military*”.¹³ Dalam Konstitusi Filipina 1987, hal ini lebih dipertegas: “*Civilian authority is, at all times, supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the State. Its goal is to secure the sovereignty of the State and the integrity of the national territory*”.¹⁴

Saat Ferdinand Marcos menjabat presiden, khususnya sejak Undang-Undang Darurat Perang 1972, militer mengalami proses politisasi secara masif. Jumlah personel ditingkatkan dan diiringi dengan penempatan personel militer aktif sebagai pemangku jabatan sipil. Di beberapa provinsi, komandan militer menggantikan jabatan gubernur dan walikota.¹⁵ Ronald E. Dolan menyebut bahwa Marcos bertanggungjawab membuat AFP yang semula adalah institusi bebas politik menjadi aktor utama dalam perpolitikan Filipina.¹⁶ Tindakan Marcos yang merugikan AFP secara jangka panjang diantaranya mengutamakan rekrut prajurit yang berasal dari Ilocos, daerah asal Marcos. Pada tingkat pejabat teras militer terjadi “iloconisasi”. Istilah tersebut merujuk pada tindakan nepotisme dengan menempatkan perwira yang berasal dari Ilocos pada pos jabatan strategis. Promosi jabatan tidak diperoleh berdasarkan prestasi prajurit, namun kesetiaan

¹³ The Constitution of the Republic of the Philippines (1973). Article II: Declaration of Principles and State Policies, Section 8. Naskah Konstitusi 1973 dapat disimak di *GOVPH - 1973 Constitution of the Republic of the Philippines* [online] <http://www.gov.ph/constitutions/1973-constitution-of-the-republic-of-the-philippines-2/> diakses pada 7 November 2014 pukul 18.20 WIB.

¹⁴ The Constitution of the Republic of the Philippines (1987). Article II: Declaration of Principles and State Policies, Section 3. Naskah Konstitusi 1973 dapat disimak di *GOVPH - The Constitution of the Republic of the Philippines* [online] dalam <http://www.gov.ph/constitutions/1987-constitution/> diakses 7 November 2014 pukul 18.23 WIB.

¹⁵ Carl H. Lande, “Krisis Politik” dalam John Bresnan (Editor), *Krisis Filipina, Zaman Marcos dan Keruntuhannya* (Jakarta: PT Gramedia, 1988), hlm. 181.

¹⁶ Ronald E. Dolan, ed. *Philippines: A Country Study*. Washington: GPO for the Library of Congress, 1991 [online] dalam <http://countrystudies.us/philippines/57.htm> diakses 10 Oktober 2014.

terhadap rejim, hubungan kekeluargaan dan ikatan primordial. Keadaan ini diperparah dengan diijinkannya militer mendapatkan penghasilan di luar gaji, baik secara resmi maupun tidak. Hal ini berujung pada praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.¹⁷ Situasi tersebut menimbulkan kekecewaan perwira-perwira muda idealis yang mencita-citakan angkatan bersenjata profesional. Di sisi lain, perwira loyalis Marcos yang merasakan beragam keuntungan mulai kehilangan peran saat Marcos jatuh dan digantikan pemerintahan demokratis.

Keresahan kedua pihak tersebut mencapai titik kulminasinya pada masa pemerintahan Presiden María Corazón Sumulong Cojuangco Aquino atau yang biasa disebut Cory Aquino. Ketidakpuasan terhadap pemerintah termanifestasikan dalam bentuk upaya kudeta militer oleh kedua pihak tersebut. Masa pemerintahan Presiden Cory Aquino yang berlangsung dari tahun 1986 hingga 1992 diwarnai sembilan kali upaya kudeta yang melibatkan militer. Berulangnya kudeta mengindikasikan adanya masalah dalam hubungan sipil-militer di Filipina. Keterlibatan militer dengan kekuatan bersenjatanya menimbulkan dampak yang luas dan serius dalam berbagai bidang.

Salah satu contoh adalah saat meletus kudeta Desember 1989, Filipina sempat terisolir karena bandara yang melayani penerbangan domestik maupun internasional dikuasai tentara pemberontak. Sementara kondisi yang mencekam memicu terjadinya *panic buying* (pembelian mendadak karena kepanikan massal) dan penimbunan komoditas oleh masyarakat yang resah. Kondisi keuangan juga mengalami keguncangan sehingga bank sentral Filipina perlu mengeluarkan dana sebesar US \$ 230 juta untuk menutupi kemunduran di sektor perbankan. Sementara sektor pariwisata terpukul dengan menurunnya tingkat hunian hotel-hotel antara 40% hingga 90 %. Namun ancaman terbesar adalah pada stabilitas pemerintahan Cory Aquino dan keberlangsungan roda perekonomian yang melibatkan komunitas bisnis internasional.¹⁸

¹⁷ Carl H. Lande, *op.cit.*, 181-182.

¹⁸ Eduardo C. Tadem, "The Aquino Government Under Siege" dalam *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*, Vol. 5 No. 4, 1989, hlm. 30.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji peristiwa dalam bingkai judul “Kudeta Militer Filipina terhadap Presiden Corazón Aquino, 1986-1990”.

Alasan pemilihan judul tersebut antara lain:

- 1) Kudeta yang terjadi tahun 1986 hingga 1990 menimbulkan dampak yang masif bagi kehidupan bernegara di Filipina.
- 2) Keterlibatan militer dalam kudeta terhadap pemerintah mengindikasikan ketidakharmonisan hubungan sipil-militer di Filipina.
- 3) Kudeta terjadi pada masa transisi dari pemerintahan diktator menuju era demokrasi.
- 4) Melalui penulisan skripsi ini dapat diketahui bagaimana pemerintahan Presiden Corazón “Cory” Aquino menghadapi upaya kudeta militer.
- 5) Secara internal, pihak angkatan bersenjata Filipina harus berjuang untuk melakukan konsolidasi sekaligus memadamkan pemberontakan yang dilancarkan anggota mereka.

Judul tersebut mengandung pengertian bahwa skripsi ini membahas peristiwa kudeta yang terjadi di Filipina pada masa pemerintahan Presiden Corazón Aquino. Kudeta terjadi dalam rentang waktu tahun 1986 hingga 1990 dan dilancarkan oleh pihak tertentu dalam tubuh AFP (*Armed Forces of the Philippines*).

Istilah kudeta berasal dari bahasa Perancis *coup d'état* (dibaca: *kudeta*) yang secara harfiah berarti pukulan terhadap negara (*stroke of state*). Istilah kudeta merujuk pada “tindakan yang kuat, biasanya berupa kekerasan dan tindakan militer, atau keterlibatan penggunaan kekuatan militer untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan menggantinya dengan otoritas pemerintahan baru”. Michael Glazer sebagaimana dikutip Erwin S. Fernandez menambahkan bahwa kudeta merupakan kekuatan yang secara inkonstitusional berupaya menguasai pemerintahan yang dilakukan suatu kelompok kecil dengan menggunakan siasat berupa perencanaan dan pendadakan, serta

acapkali menggunakan kekerasan secara terbatas.¹⁹ Sementara Edward Luttwak menyatakan bahwa kudeta mencakup infiltrasi ke dalam segmen aparatur negara yang kecil namun penting, yang lantas digunakan untuk mengambil alih pemerintahan dari kendali unsur lainnya.²⁰

Menurut Francisco Nemenzo, *coup d'état* adalah kosakata bahasa Perancis yang identik dengan istilah *putsch* dalam bahasa Jerman dan *golpe de estado* dalam bahasa Spanyol-Amerika. Istilah ini mengacu pada penggulingan paksa pemerintahan oleh faksi tertentu dalam pemerintahan itu sendiri. Kudeta berbeda dengan pemberontakan yang dilancarkan oleh kaum miskin, kudeta justru melibatkan orang-orang yang sudah menduduki posisi tertentu dalam lingkaran kekuasaan. Kudeta seringkali dilancarkan dengan pendudukan istana kepresidenan, selain itu kudeta meliputi penguasaan obyek-obyek vital seperti media massa, jaringan telepon, perusahaan listrik, bank, dan lain-lain. Secara spesifik, sasaran strategis kudeta bervariasi antara satu negara dengan negara lain, tergantung pada tingkatan teknologi dan organisasi dalam ibu kota negara yang bersangkutan.²¹

Militer dalam sebuah negara identik dengan angkatan bersenjata. Dalam Konstitusi Filipina 1987 disebutkan bahwa *The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the State. Its goal is to secure the sovereignty of the State and the integrity of the national territory* (Angkatan Bersenjata Filipina adalah pelindung rakyat dan negara. Angkatan Bersenjata Filipina bertujuan untuk melindungi

¹⁹ “The New International Webster’s Comprehensive Dictionary of the English Language” dan “Dictionary of Military Terms: A Guide to Language of Warfare & Military Institutions” sebagaimana dikutip dalam Erwin S. Fernandez, “The Quest for Power: The Military in Philippine Politics, 1965-2002” dalam *Asia Pacific: Perspective*, Volume VI Number 1, 15 Mei 2006, hlm. 40.

²⁰ Edward Luttwak, *Kudeta, Teori dan Praktik Penggulingan Kekuasaan* (Yogyakarta: Relief, 2009), hlm. 32.

²¹ Francisco Nemenzo, “A Season of Coups (Reflections on the Military in Politics)” dalam *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*, Vol. 3 No. 2, 1987, hlm. 5.

kedaulatan negara dan keutuhan wilayah nasional).²² Adapun keanggotaan angkatan bersenjata Filipina adalah disebutkan dalam Article XVI Section 4, *The Armed Forces of the Philippines shall be composed of a citizen armed force which shall undergo military training and serve as may be provided by law. It shall keep a regular force necessary for the security of the State* (Angkatan Bersenjata Filipina tersusun dari tentara rakyat yang menjalani pelatihan militer dan mengabdikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selanjutnya akan menjadi pasukan reguler untuk melindungi negara).²³

Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *government*. Istilah ini berasal dari bahasa Latin *gubernāre*, bahasa Yunani *kybernân* yang berarti *to steer* atau mengemudikan.²⁴ Menurut Ramlan Surbakti pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional dan dari segi kewenangan (fungsi). Ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Apabila ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara maka pemerintah berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Berdasarkan ketiga batasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara (fungsi negara). Pemerintahan juga dapat diartikan secara luas maupun sempit,

²² The Constitution of the Republic of the Philippines (1987). Article II: Declaration of Principles and State Policies, Section 3. Naskah Konstitusi 1973 dapat disimak di *GOVPH - The Constitution of the Republic of the Philippines* [online] dalam <http://www.gov.ph/constitutions/1987-constitution/> diakses 7 November 2014 pukul 18.23 WIB.

²³ The Constitution of the Republic of the Philippines (1987). Article XVI: General Provisions, Section 4. Naskah Konstitusi 1973 dapat disimak di *GOVPH - The Constitution of the Republic of the Philippines* [online] dalam <http://www.gov.ph/constitutions/1987-constitution/> diakses 7 November 2014 pukul 18.23 WIB.

²⁴ Taliziduhu Ndraha, *Metodologi Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 7.

peerintahan dalam arti luas meliputi seluruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja.²⁵

C.F Strong sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafiiie menyatakan bahwa pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti membuat undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.²⁶

Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dalam sebuah negara. *The executive power shall be vested in the President of the Philippines* (kekuasaan eksekutif yang sah adalah Presiden Filipina).²⁷ Presiden Filipina sekaligus sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, hal ini disebutkan dalam konstitusi, *The President shall be the Commander-in-Chief of all armed forces of the Philippines and whenever it becomes necessary, he may call out such armed forces to prevent or suppress lawless violence, invasion or rebellion. In case of invasion or rebellion, when the public safety requires it, he may, for a period not exceeding sixty days, suspend the privilege of the writ of habeas corpus or place the Philippines or any part thereof under martial law* (Presiden adalah sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Filipina dan kapanpun diperlukan, Presiden dapat memerintahkan Angkatan Bersenjata untuk mencegah atau menindak kekerasan yang melanggar hukum, invasi atau

²⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 1992), hlm. 168-169.

²⁶ Inu Kencana Syafiiie, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 5-6.

²⁷ The Constitution of the Republic of the Philippines (1987). Article VII: Executive Department, Section 1. Naskah Konstitusi 1973 dapat disimak di *GOVPH - The Constitution of the Republic of the Philippines* [online] dalam <http://www.gov.ph/constitutions/1987-constitution/> diakses 7 November 2014 pukul 18.23 WIB.

pemberontakan. Dalam hal invasi atau pemberontakan, manakala keselamatan umum mengharuskan, Presiden, dalam kurun waktu tidak lebih dari enam puluh hari, menanggukhak hak istimewa *habeas corpus* atau menempatkan Filipina atau bagian manapun di bawah undang-undang darurat perang).²⁸

María Corazón Sumulong "Cory" Cojuangco Aquino yang biasa disebut Corazón Aqino atau Cory Aquino, adalah presiden kesebelas dalam sejarah Republik Filipina, sekaligus presiden wanita pertama di Filipina. Masa pemerintahannya berlangsung antara 25 Februari 1986 hingga 30 Juni 1992. Pada kurun waktu antara 1986 hingga 1990, terjadi sembilan kali upaya kudeta terhadap pemerintahan Cory Aquino.

1.2 Rumusan Masalah

Agar pemecahan masalah dapat tuntas dan tidak salah arah, ruang lingkup masalah harus dibatasi dan dinyatakan atau dirumuskan dengan jelas.²⁹ Dalam kajian ini ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang mendorong terjadinya peristiwa kudeta di Filipina tahun 1986-1990?
2. Bagaimana kronologi kudeta tersebut?
3. Bagaimana pemerintah Filipina menanggulangi kudeta tersebut?
4. Apa dampak kudeta bagi kehidupan bernegara di Filipina?

²⁸ The Constitution of the Republic of the Philippines (1987). Article VII: Executive Department, Section 18. Naskah Konstitusi 1973 dapat disimak di *GOVPH - The Constitution of the Republic of the Philippines* [online] dalam <http://www.gov.ph/constitutions/1987-constitution/> diakses 7 November 2014 pukul 18.23 WIB.

²⁹ Universitas Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Edisi Ketiga Cetakan Kedua; Jember: Jember University Press, 2010), hlm. 21.

1.3 Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

- 1) Mengidentifikasi hal-hal yang mendorong terjadinya kudeta pada masa pemerintahan Presiden Corazón Aquino di Filipina tahun 1986-1990.
- 2) Mengetahui kronologi kudeta tahun 1986-1990 terhadap pemerintahan Presiden Corazón Aquino.
- 3) Mengetahui usaha-usaha pemerintah Filipina dalam menanggulangi kudeta tahun 1986 hingga 1990
- 4) Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari peristiwa kudeta tersebut.

B. Manfaat

1. Sebagai kontribusi karya ilmiah dalam penulisan sejarah, khususnya sejarah militer.
2. Sebagai telaah historis bagi penyelenggaraan hubungan sipil-militer.
3. Sebagai wacana bagi mahasiswa yang menekuni studi Ilmu Sejarah,
4. Sebagai sarana analisis fenomena sejarah, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu seputar supremasi sipil.
5. Sebagai bahan pemikiran tentang profesionalisme militer di negara demokrasi.
6. Sebagai inspirasi bagi mahasiswa Ilmu Sejarah untuk meneliti sejarah militer dan sejarah Asia Tenggara, guna memperkaya khasanah penulisan sejarah dengan karya-karya yang lebih sempurna di masa mendatang.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Samuel Huntington, kudeta dapat digolongkan baik sebagai aksi politik maupun aksi militer.¹ Sebagai aksi politik, kudeta adalah upaya pelanggaran hukum berupa pengambilalihan kekuasaan dari pemerintahan yang konstitusional.² Kudeta menggunakan militer untuk mengganti petahana dengan mereka sendiri maupun sosok yang mereka dukung. Adapun sebagai operasi militer, strategi kudeta adalah hal yang paling penting.³

Pada banyak kasus, kudeta dilancarkan oleh seluruh angkatan bersenjata atau kelompok perwira militer yang dipolitisasi dan berada dalam ketidakpuasan terhadap kepemimpinan sipil. Politisasi adalah proses dimana personel militer mendapat dan membangun kesadaran politik serta cenderung menganggap fungsi di luar tugas pokoknya adalah sesuatu yang wajar, karena masih berhubungan dengan peran militer dalam pertahanan nasional. Bentuk yang paling ekstrem dari fenomena ini adalah ketika mereka menggunakan senjata dan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka untuk menghadapi orang (pemerintah) dan negara.

¹ Samuel P. Huntington, "Political Order in Changing Societies" sebagaimana dikutip dalam The Fact-Finding Commission, *The Final Report of the Fact-Finding Commission (Pursuant to R.A . No. 6832)* (Bookmark Inc., Metro Manila: 1990), hlm. 3.

² Gregor Ferguson, "Coup d'Etat: A Practical Manual" sebagaimana dikutip dalam The Fact-Finding Commission, *The Final Report of the Fact-Finding Commission (Pursuant to R.A . No. 6832)* (Bookmark Inc., Metro Manila: 1990), hlm. 3.

³ Samuel P. Huntington, "Political Order in Changing Societies", *loc.cit.*

Politisasi semacam ini dapat terjadi pada tingkat kelembagaan, seksi, maupun individu.⁴ Fenomena tersebut terjadi dalam peristiwa kudeta di Filipina.

Terdapat tiga unsur utama untuk keberhasilan kudeta: kejutan (*surprise*), kecepatan (*speed*) dan ketepatan (*precision*). Karena penguasaan senjata, perilaku tentara yang “mekanis”, dan kecenderungan kepatuhan buta (melaksanakan apapun yang diperintahkan atasan tanpa membantah), maka tentara adalah pihak yang paling sesuai untuk melaksanakannya. Sebuah kudeta biasanya direncanakan, diatur dan diarahkan oleh sebuah faksi korps perwira - dalam kasus kudeta Filipina, salah satu faksi perwira yang melancarkan kudeta adalah RAM (*REFORM of the Armed Force Movement*) pimpinan Kolonel Gregorio Ballesteros Honasan II atau yang biasa dipanggil “Gringo”.⁵

Dalam laporan yang dirilis *The Fact-Finding Commission* disebutkan bahwa sebuah kudeta memiliki enam ciri khas yaitu:

1. Kudeta adalah upaya koalisi politik untuk secara ilegal mengganti pemimpin pemerintahan yang ada melalui kekerasan atau ancaman itu.
2. Kekerasan yang digunakan biasanya kecil.
3. Para aktor kudeta telah memiliki basis kelembagaan kekuasaan dalam sistem politik.
4. Kudeta tidak selalu memerlukan partisipasi massa, atau partisipasi sebagian besar angkatan bersenjata pada tingkat yang signifikan.
5. Kudeta tidak secara terbuka mengakui setiap garis politik atau ideologi tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari segala bentuk perlawanan dari kekuatan politik yang ada.
6. Kudeta tidak terjadi secara spontan.⁶

⁴ The Fact-Finding Commission, *The Final Report of the Fact-Finding Commission (Pursuant to R.A . No. 6832)* (Bookmark Inc., Metro Manila: 1990), hlm. 3.

⁵ Francisco Nemenzo, “A Season of Coups (Reflections on the Military in Politics)” dalam *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*, Vol. 3 No. 2, 1987, hlm. 6.

⁶ The Fact-Finding Commission, *The Final Report of the Fact-Finding Commission (Pursuant to R.A . No. 6832)* (Bookmark Inc., Metro Manila: 1990), hlm. 3-4.

Erwin S. Fernandez merangkum sejumlah peristiwa kudeta yang berlangsung pada masa Cory Aquino. Beberapa diantaranya *Manila Hotel Incident, God Save The Queen January 1987, GMA 7 Incident, April 1987 'Black Saturday' Incident, July 1987 MIA Takeover Plot, August 1987 Coup Attempt*, dan *December 1989 Coup Attempt*. Selain kudeta pada masa pemerintahan Cory Aquino, Erwin S. Fernandez secara umum membahas keterlibatan militer Filipina dalam politik pada rentang waktu 1965 hingga 2002. Periode tersebut diawali dari masa kekuasaan Marcos hingga masa pemerintahan Gloria Macapagal Arroyo. Pada masa Marcos, keterlibatan militer adalah faktor krusial dalam terbentuknya pemerintahan diktator. Setelah Marcos lengser dan digantikan Cory Aquino, militer yang terpolitisasi melancarkan kudeta terhadap pemerintahan Cory. Menurut Fernandez, intervensi militer akan senantiasa menghantui politik Filipina selama tidak ada upaya “mengusir setan” masa silam. Maksud dari “mengusir setan” adalah bahwa pemerintah Filipina harus memiliki kehendak politik untuk memberi hukuman pada pelaku kudeta. Sanksi tegas diharapkan memberikan efek jera sekaligus semacam peringatan agar kudeta tidak terjadi lagi. Ketidakterdayaan Cory Aquino memberangus faksi militer seperti RAM dipandang Fernandez justru berperan mengobarkan semangat kudeta melawan pemerintah. Upaya rekonsiliasi yang digadang-gadang oleh Fidel Ramos (yang menjadi presiden setelah Cory) melalui langkah-langkah seperti amnesti secara total dan tanpa syarat, justru berpotensi membuat kudeta terulang di kemudian hari.⁷

Francisco Nemenzo membahas peristiwa politik dan upaya kudeta yang terjadi pada bulan Februari, Juli dan November 1986 dan Januari 1987. Analisis Nemenzo diantaranya tentang peran militer dalam peristiwa politik di Filipina, yang berdampak pada keterlibatan militer dalam berbagai upaya kudeta. Nemenzo membahas keterlibatan Juan Ponce Enrile dan pengikutnya, para perwira muda

⁷ Erwin S. Fernandez, “The Quest for Power: The Military in Philippine Politics, 1965-2002” dalam *Asia Pacific: Perspective*, Volume VI Number 1, 15 Mei 2006, hlm. 38-47.

idealis dalam Revolusi EDSA⁸ (Februari 1986) dan plot God Save the Queen (November 1986). Pendudukan channel 7 (Januari 1987) yang dipimpin Kolonel Oscar Canlas ditanggapi berbeda oleh Presiden Cory Aquino, apabila dibandingkan dengan pendudukan Hotel Manila. Presiden mengutuk keras pendudukan channel 7 dan menanggapi dengan mengerahkan kekuatan militer. Penanganan kasus tersebut di lapangan menampilkan perbedaan cara yang digunakan Presiden dengan Kepala Staf AFP Jenderal Fidel Ramos, yang justru menggunakan cara persuasif.⁹

Carolina G. Hernandez dan Maria Cecilia T. Ubarra memaparkan bahwa kudeta Filipina pada masa Cory Aquino sebagai tantangan atas kepemimpinan politik Cory. Keduanya memberi perhatian pada pendudukan Hotel Manila oleh Arturo Tolentino dan anak buahnya. Dalam bahasa yang cermat, disebutkan bahwa masa “bulan madu” Cory Aquino selama tiga bulan berakhir dengan ujian berat di awal pemerintahannya. Pendapat tersebut tidaklah berlebihan, mengingat kekuatan Tolentino termasuk juga 490 personel militer bersenjata dan sekitar 5000 simpatisan Marcos.¹⁰

Hernandez dan Ubarra mengidentifikasi sejumlah ketidakpuasan dari pihak militer terkait dengan kudeta yang terjadi tahun 1989. Beberapa diantaranya terkait penggelaran kekuatan militer seperti minimnya gaji, suplai logistik yang tidak memadai, tindakan pilih kasih dalam hal promosi jabatan dan penugasan, serta perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap militer - bila dibandingkan

⁸ Revolusi EDSA (disebut juga *People Power Revolution*, Revolusi Februari 1986 atau Revolusi Kuning) merupakan gerakan damai rakyat Filipina pada 25 Februari 1986 yang mengakhiri kekuasaan rejim Ferdinand Marcos. EDSA adalah singkatan dari *Epifanio de los Santos Avenue*, salah satu jalan utama di Metro Manila sepanjang 54 km yang menjadi tempat massa berkumpul. Revolusi EDSA merupakan salah satu revolusi damai, sehingga disebut sebagai *bloodless revolution*. Disarikan dari Philippine History, “*EDSA People Power Revolution*” [online] dalam <http://www.philippine-history.org/edsa-people-power-revolution.htm> diakses 28 April 2015 pukul 8.00.

⁹ Francisco Nemenzo, *op.cit.*, hlm. 5-14.

¹⁰ Carolina G. Hernandez dan Maria Cecilia T. Ubarra. *Restoring and Strengthening Civilian Control: Best Practices in Civil-Military Relations in the Philippines*. Institute for Strategic and Development Studies, Inc. 31 Desember 1999, hlm. 12.

dengan simpatisan Marcos. Selain itu, sejumlah persoalan lainnya adalah isu suap dan korupsi, kegagalan pemerintah memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, inefisiensi birokrasi, ketiadaan rekonsiliasi, ketidakadilan perlakuan terhadap militer dan pemberontak terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta tidak terpadunya strategi antara pemerintah (sipil) dan militer terkait penanggulangan pemberontakan¹¹.

Sebagai pakar hubungan sipil-militer di Filipina, Carolina G. Hernandez juga mengulas peristiwa kudeta terhadap Cory Aquino dari kacamata hubungan sipil-militer. Diawali gagasan bahwa secara alamiah hubungan sipil-militer senantiasa memiliki kecenderungan berubah-ubah. Hernandez mengingatkan bahwa sebelum 1972, hubungan sipil-militer masih berdasar atas supremasi sipil atas militer baik dalam tataran teori maupun kenyataan di lapangan. Namun berkuasanya rejim diktator menyebabkan perubahan pola hubungan tersebut. Tatkala diatur oleh prinsip supremasi sipil atas militer, hubungan ini berlangsung namun tidak lagi dari beberapa lembaga seperti di masa lalu, melainkan oleh kekuatan diktator yang terpusat¹².

Para pemimpin kudeta adalah alumni PMA (*Philippine Military Academy*, Akademi Militer Filipina) angkatan 1971, yang memulai pengabdian pada masa kediktatoran Marcos. Masa tersebut adalah awal dari efek kumulatif dari perubahan pola hubungan sipil-militer Filipina. Awal masa pengabdian para perwira ini berhadapan dengan berubahnya peran militer yang kala itu difokuskan sebagai mitra dalam pembangunan nasional, menurut versi Marcos. Pada masa Cory Aquino, sulit bagi mereka untuk menempatkan diri dalam peran subordinat, terutama setelah partisipasi mereka dalam Revolusi EDSA, dan persepsi mereka bahwa pemerintah telah berlaku tidak adil. Jika pemerintah tidak segera

¹¹ Carolina G. Hernandez dan Maria Cecilia T. Ubarra, *op.cit.*, hlm. 12-13

¹² Carolina G. Hernandez, "Towards Understanding Coups and Civilian-Military Relations" dalam *Kasarinlan: Philippine Journal of the Third World Studies*, Vol. 3 No. 2, 1987, hlm. 19.

melakukan sesuatu untuk menetralkan situasi dan menegakkan supremasi sipil atas militer, kudeta maupun ancaman kudeta akan terus ada.¹³

P.N Abinales menganalisis kudeta 28 Agustus 1987 dengan mengawali pandangannya terhadap politisasi AFP pada era Ferdinand Marcos. Menurutny, tentara yang dipolitisasi akan menyadari besarnya kekuatan dan besarnya pengaruh mereka di masyarakat. Dalam hal ini, tentara yang dimaksud adalah korps perwira muda yang masih idealis. Tatkala berkuasa, Marcos menerapkan patronase secara selektif terhadap bawahannya, tindakan yang lantas ditiru dalam hierarki AFP. Hal ini menjadi salah satu sebab terjadinya perpecahan dan konflik antara jenderal-jenderal loyalis Marcos dengan para pamen (perwira menengah). Para pamen ini menyadari bahwa AFP telah menyimpang dari peran dasarnya sebagai lembaga dalam masyarakat dan mundur daya gunanya sebagai alat pemaksa negara (*instrument of coercion*).¹⁴

Kudeta Desember 1989 yang sering dipandang sebagai kudeta terbesar sepanjang sejarah Filipina, mendapat perhatian dari sejumlah peneliti. Randolph S. David misalnya, menyetengahkan sejumlah pemikirannya atas kudeta Desember 1989 yang dimuat dalam jurnal Filipina berbahasa Inggris, *Kasarinlan*. Berikut pendapat Randolph S. David tentang sejumlah alasan kenapa kudeta tersebut pecah pada bulan Desember, yaitu:

1. Jeda waktu yang cukup sejak upaya kudeta terakhir dilancarkan.
2. Popularitas Cory yang menurun dari waktu ke waktu sebagaimana ditunjukkan oleh hasil survei.
3. Terjadi krisis kredibilitas kepemimpinan politik selama dua tahun terakhir.
4. Timbul kegelisahan di jalan-jalan dengan adanya demonstrasi guru sekolah, penglaju yang ingin bisa naik angkutan umum, petani padi menuntut peningkatan subsidi *palay* (padi/gabah), serta mahasiswa yang

¹³ Carolina G. Hernandez, *op.cit.*, hlm. 22

¹⁴ P.N Abinales, "The Agust 28 Coup: The Possibilities and Limits of the Military Imagination" dalam *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*, Vol. 3 No. 2, 1987, hlm. 11-12.

menuntut pengembalian biaya pendidikan. Hal ini diperparah dengan frekuensi gangguan listrik mendadak yang menyebabkan gangguan di kantor-kantor pabrik dan rumah tangga. Namun yang paling parah adalah pengumuman mendadak kenaikan harga minyak tiga hari sebelum kudeta, yang memicu rencana pemogokan umum.

5. Potret kemiskinan yang semakin menjadi-jadi: meningkatnya jumlah pengemis di jalan, pemukiman liar bermunculan di mana-mana, pemulung berkelahi satu sama lain atas tumpukan sampah, dan keluarga tidur di trotoar, kontras dengan kemakmuran yang ditampilkan oleh lalu-lalang mobil mewah seperti Pajero dan Mercedes Benz.
6. Simpati publik atas meninggalnya Marcos, yang diwujudkan melalui sentimen umum mendukung pemakaman mantan presiden Marcos di Filipina.
7. Timbulnya kebingungan dan reaksi permusuhan antara kepolisian dan *Philippine Constabulary* (PC) sebagai dampak Rencana Undang-Undang Kepolisian Nasional Filipina. Kondisi ini boleh jadi sudah diperkirakan sebelumnya oleh perancang kudeta, menjadi alasan yang cukup untuk menetralkan keduanya atau bahkan merekrut mereka untuk bersama-sama melawan pemerintah.¹⁵

Sukarno menulis usaha kudeta terhadap pemerintahan Cory Aquino dalam skripsi berjudul *Usaha Kudeta Reform the Army Forces Movement terhadap Kepemimpinan Cory Aquino*.¹⁶ Pada kajian ini Sukarno membahas kudeta yang dilancarkan kelompok RAM terhadap Presiden Cory Aquino. Sementara R. Bima Candra menulis *Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kudeta*

¹⁵ Randolph S. David, "The December First Coup: Persistent Question and Tentative Responses" dalam *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*, Vol. 5 No. 1 (1989), hlm. 2-3.

¹⁶ Sukarno, "Usaha Kudeta Reform the Army Forces Movement terhadap Kepemimpinan Cory Aquino", *Skripsi* pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jember, 1990.

Militer 28 Agustus 1987 di Filipina,¹⁷ fokus kajian tulisan ini adalah kudeta militer 28 Agustus 1987 yang dipimpin Kolonel Gregorio Honasan dan kawan-kawan. Dari *Naval Postgraduate School*, California, Manuel Carlos yang mengangkat topik pengaruh Amerika Serikat terhadap profesionalisme militer Filipina sempat menyinggung isu kudeta pada masa Cory. Menurutnya, rejim Cory Aquino menghadapi rangkaian upaya kudeta yang mempersulit usahanya mengkonsolidasi kekuatan. Dalam ranah profesionalisme militer, upaya kudeta mengindikasikan pihak tertentu dalam tubuh AFP, yakni RAM yang tidak menghendaki untuk tunduk pada otoritas sipil. Faksionalisme juga nampak pada para perwira teras AFP.¹⁸

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan kajian-kajian yang diuraikan di atas. Fokus kajian penulis adalah analisis terhadap dinamika yang terjadi dalam militer Filipina sejak sebelum masa pemerintahan Cory Aquino, yang pada akhirnya berujung pada peristiwa kudeta. Sebagai titik kulminasi, kudeta yang terjadi merupakan akumulasi dari beragam permasalahan yang melanda AFP pada masa silam, terutama sejak Ferdinand Marcos memberlakukan Undang-Undang Darurat Perang 1972. Gagasan utama skripsi ini adalah bahwa permasalahan demi permasalahan yang timbul pada masa Marcos dan Cory telah memicu sebagian pihak dalam tubuh angkatan bersenjata Filipina untuk melancarkan kudeta terhadap pemerintahnya sendiri.

Skripsi ini berupaya memaparkan secara umum peristiwa kudeta yang berlangsung pada masa pemerintahan Cory Aquino, untuk menemukan pola dinamika hubungan sipil-militer Filipina di masa silam. Penulis juga berusaha menganalisis sebab dan kronologi kudeta berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para cendekiawan yang kompeten. Ilmu sejarah dapat berperan menyumbangkan pemikiran dalam studi hubungan sipil-militer di masa silam sebagai upaya memetakan permasalahan dan resolusi konflik, melalui kajian-

¹⁷ R. Bima Candra, "Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kudeta Militer 28 Agustus 1987 di Filipina", *Skripsi* pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1992.

¹⁸ Manuel R. Carlos, *US Influence on Military Professionalism in the Philippines* (tesis pada *Naval Postgraduate School*, Monterey, California: 2003), hlm. 15-16.

kajian sejarah yang relevan. Pemerintah wajib memberikan perhatian kepada militer seperti mengupayakan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kesejahteraan prajurit. Di sisi lain militer harus tetap dan selalu sebagai alat pertahanan negara yang profesional dan bebas dari anasir politik. Cita-cita terhadap hubungan sipil-militer yang harmonis seyogyanya tidak hanya menjadi harapan para cerdik cendekia dan elit pemerintahan saja, namun juga para perwira militer, masyarakat sipil dan seluruh elemen bangsa dan negara, dalam rangka mewujudkan negara yang aman, adil, makmur dan berdaulat.

Perbedaan pokok bahasan antara skripsi ini dengan karya terdahulu dapat disimak dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Perbedaan pokok bahasan

No.	Nama	Judul	Pokok Bahasan
1	Erwin S. Fernandez	The Quest for Power: The Military in Philippine Politics, 1965-2002	Peran militer (AFP) dalam perpolitikan di Filipina
2	Carolina G. Hernandez dan Maria Cecilia T. Ubarra	Restoring and Strengthening Civilian Control: Best Practices in Civil-Military Relations in Philippines	Tinjauan kritis atas hubungan sipil-militer di Filipina
3	Carolina G. Hernandez	Towards Understanding Coups and Civilian-Military Relations	Benang merah antara hubungan sipil-militer dengan kudeta yang melanda Filipina
4	P.N Abinales	The August 28 Coup: The Possibilities and Limits of the Military Imagination	Dampak politisasi militer pada masa Marcos terhadap aksi kudeta 28 Agustus 1987

5	Randolf S. David	The December First Coup: Persistent Question and Tentative Responses	Sebab dan akibat kudeta Desember 1989
6	Eduardo C. Tadem	The Aquino Government Under Siege	Dampak kudeta Desember 1989
7	Sukarno	Usaha Kudeta Reform Army Movement terhadap Kepemimpinan Cory Aquino	Kudeta RAM terhadap pemerintahan Cory Aquino
8	R. Bima Candra	Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kudeta Militer 28 Agustus 1987 di Filipina	Penyebab kudeta 28 Agustus 1987
9	Manuel R. Carlos	US Influence on Military Professionalism in the Philippines	Pengaruh Amerika Serikat terhadap profesionalisme militer Filipina
10	David Indra Kusuma	Kudeta Militer Filipina terhadap Presiden Corazón Aquino, 1986-1990	Kudeta militer terhadap pemerintah sipil antara tahun 1986-1990

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian sejarah mensyaratkan adanya pembatasan ruang lingkup penelitian. Hal ini menjadi krusial karena menjadi pedoman taktis dan strategis bagi peneliti agar kajian ilmiahnya menjadi lebih jelas dan terarah. Pembatasan ruang lingkup penelitian dalam sejarah menjadikan penelitian lebih mudah untuk dilakukan secara empiris, metodologis dan dapat dipertanggungjawabkan.¹

Dalam penelitian ini, terdapat tiga batasan yakni lingkup spasial (geografis), lingkup temporal (waktu) dan lingkup kajian (perspektif). Lingkup spasial berupa batasan geografis terjadinya peristiwa. Dalam skripsi ini ditetapkan bahwa lingkup spasial adalah Filipina, tempat terjadinya peristiwa kudeta terhadap Presiden Corazón Aquino. Adapun lingkup temporal adalah batasan waktu terjadinya peristiwa, dari awal hingga akhir. Lingkup temporal skripsi ini diawali tahun 1986 dan diakhiri tahun 1990. Pemilihan lingkup temporal didasarkan pada fakta sejarah bahwa kudeta pada masa pemerintahan Presiden Corazón Aquino terjadi pertama kali pada tahun 1986 (pendudukan Hotel Manila) dan terakhir terjadi tahun 1990 (kudeta Oktober 1990). Setelah upaya kudeta Oktober 1990, hingga masa jabatan Presiden Corazón Aquino berakhir pada 1992 tidak terjadi lagi upaya kudeta.

¹ Kartini Kartono, “Pengantar Metodologi Riset Sosial” sebagaimana dikutip dalam Nurhadi Sasmita, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember* (Yogyakarta: Lembah Manah, 2012), hlm. 20.

Adapun lingkup kajian skripsi ini adalah sejarah militer. Sebagai salah satu unsur kekuatan sejarah,² militer memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara di era modern. Menurut Michael Howard dari Oxford University, sejarah militer secara sederhana dapat diartikan sebagai sejarah angkatan bersenjata dan penyelenggaraan perang.³ Adapun David Chandler, Kepala Departemen Studi Perang dan Hubungan Internasional Akademi Militer Kerajaan Inggris sebagaimana dikutip oleh Michael Howard berpendapat bahwa sejarah militer adalah studi tentang organisasi militer modern, persenjataan, operasi, dan juga studi kontemporer tentang konflik bersenjata baik secara internasional maupun internal dalam politik mereka, aspek ekonomi dan militer; peran aliansi dan sistem keamanan lainnya; pelucutan senjata dan pengawasan senjata; doktrin strategis dan prioritas pertahanan nasional.⁴

Beberapa kategori dalam sejarah militer menurut Thomas E. Griess diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Operasional*, yakni permasalahan pertempuran dan aspek militer yang mencakup logistik, taktik, strategi militer dan kepemimpinan.
- 2) *Administrasi dan Teknis*, secara umum berupa fungsi dan kegiatan profesional angkatan bersenjata. Dalam kategori ini termasuk studi tentang doktrin dan struktur organisasi, pengadaan dan pelatihan, serta pengembangan persenjataan.
- 3) *Militer dan Masyarakat*, dalam pengertian ilmu Sejarah kategori ketiga ini memandang secara menyeluruh spektrum kegiatan militer termasuk siklus perang dan damai. Pembahasan persoalan strategi nasional, hubungan antara militer, sosial-politik, ekonomi, dan elemen psikologis pada tingkat nasional. Kategori ini juga terkait dengan problem kelembagaan berikut

² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 134-135.

³ Michael Howard, "What is Military History?", *History Today* [online] dalam <http://www.historytoday.com/michael-howard/what-military-history> diunduh 18 November 2014 pukul 11.06 WIB.

⁴ *Ibid.*

solusi dan pengembangannya, juga mengulas hubungan antara sipil dengan otoritas militer.⁵

Dari beberapa uraian di atas, skripsi ini relevan baik dengan pendapat Griess tentang pembahasan hubungan antara sipil dan otoritas militer maupun Chandler tentang konflik bersenjata dalam internal militer. Pihak sipil yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah sebagai otoritas yang membawahi militer, sesuai dengan asas supremasi sipil. Kudeta Filipina yang dibahas dalam skripsi ini merupakan puncak dari dinamika hubungan sipil-militer yang terjadi sejak masa Ferdinand Marcos menjabat sebagai presiden, dimana yang bersangkutan menetapkan Undang-Undang Darurat Perang 1972 melalui Proklamasi Nomor 1081. Pemerintahan Cory Aquino yang berjalan kemudian juga membuat sejumlah kebijakan yang turut berperan menjadikan sebagian oknum militer melancarkan resistensinya berupa kudeta terhadap pemerintahan yang seharusnya justru mereka lindungi.

3.2 Pendekatan dan Kerangka Teoretis

Pendekatan dalam kajian sejarah memegang peranan penting, karena akan menentukan unsur-unsur masa silam yang harus dimunculkan dalam narasi.⁶ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan hubungan sipil-militer guna menganalisis fenomena kudeta yang terjadi di Filipina pada 1986-1990. Mengenai batasan hubungan sipil-militer, Morris Janowitz menyebutkan “penelitian berkenaan dengan angkatan bersenjata dan masyarakat”.⁷ Kajian tentang hubungan sipil-militer telah banyak ditulis, diantaranya oleh Samuel Huntington, Eric Nordlinger maupun Carolina Hernandez, yang secara spesifik

⁵ Thomas E. Griess, “A Perspective on Military History” dalam John E. Jessup, Jr. dan Robert W. Coakley, *A Guide to the Study and Use of Military History* (Center of Military History United States Army: Washington DC, 1988), hlm. 31.

⁶ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hlm. 4.

⁷ Morris Janowitz (Editor), *Hubungan-Hubungan Sipil-Militer Perspektif Regional* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hlm. VII.

banyak menghasilkan karya tentang hubungan sipil-militer di Filipina. Dalam negara bangsa modern, umumnya militer berada di bawah supremasi sipil dan hal ini diatur dalam konstitusi.

Dengan menggunakan pendekatan hubungan sipil-militer, akan dimunculkan narasi tentang perkembangan angkatan bersenjata Filipina serta perannya dalam sejarah bangsa dan negara Filipina. Melalui pendekatan ini diharapkan sebab mengapa militer Filipina memberontak dapat diketahui, sehingga memperjelas analisis peristiwa kudeta yang terjadi antara tahun 1986 hingga 1990. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa peristiwa kudeta di Filipina terjadi akibat ketidakharmonisan hubungan sipil militer, antara pemerintahan Presiden Corazón “Cory” Aquino dan angkatan bersenjata Filipina (AFP).

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori kudeta dari Eric Nordlinger dan Edward Luttwak. Teori ini dipilih dengan asumsi bahwa kudeta merupakan suatu rangkaian peristiwa yang saling berkaitan, mulai dari latar belakang militer di suatu negara, faktor pendorong militer untuk melakukan kudeta, dan akhirnya peristiwa kudeta itu sendiri. Nordlinger mengemukakan teori tentang bagaimana militer dapat terlibat dalam upaya campur tangan dan akhirnya melancarkan kudeta, sangat relevan untuk memperoleh gambaran bagaimana militer Filipina mengalami dinamika yang membawa sebagian anggotanya untuk melakukan kudeta. Teknis pelaksanaan kudeta diulas secara seksama oleh Edward Luttwak, dan digunakan untuk menganalisis kronologi kudeta yang berlangsung di Filipina pada tahun 1986-1990.

Eric Nordlinger berpendapat bahwa *campur tangan* pihak militer bisa terjadi antara lain akibat kegagalan pemerintah sipil dan hilangnya legitimasi sebagai akibat kegagalan tersebut. Hilangnya legitimasi pemerintahan sipil adalah hal penting yang memudahkan perubahan motivasi untuk campur tangan atau percobaan untuk melancarkan kudeta.⁸

⁸ Eric Nordlinger, *Militer dalam Politik, Kudeta dan Pemerintahan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 92-93.

Terdapat dua hal penting tentang keterlibatan militer dalam kudeta; Pertama, pihak militer menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi kepentingan umum bagi mempertahankan negara dari ketidakmampuan pemerintahan sipil. Dengan citra militer sebagai golongan nasionalis, mereka dapat merasionalkan dan menghalalkan tindakan kekerasan yang diambil. Militer mengidentifikasikan diri mereka dengan negara, dalam arti *apa yang baik untuk militer maka baik pula bagi negara*. Begitu pula sebaliknya, martabat nasional, kedaulatan dan kekuasaan terletak di dalam dan pada angkatan bersenjata. Hal demikian hampir sama dengan situasi bahwa *kudeta sebenarnya untuk kepentingan negara* - oleh karena adanya pemikiran bahwa militer/perwira identik dengan negara dan negara identik dengan militer sebagaimana disinggung sebelumnya. Kedua, adanya kepentingan pribadi para perwira. Dalam kudeta militer, senantiasa terdapat kesamaan antara kepentingan pribadi dan kelompok. Nordlinger mengutip hasil studi Decato tentang kudeta Idi Amin di Uganda tahun 1971 yang mengindikasikan bahwa kepentingan pribadi seringkali merupakan sumber utama terjadinya kudeta militer.⁹ Namun demikian motif pribadi menjadi sumir manakala dalam praktiknya hal ini tersamar melalui kepentingan korporat perwira militer.

Upaya menggulingkan kekuasaan pemerintah adalah tidak mudah, mengingat mereka dilindungi alat pertahanan negara yang profesional dan didukung kekuatan politis. Dalam hal menghadapi alat pertahanan negara seperti angkatan bersenjata, polisi dan dinas keamanan, perencana kudeta perlu melakukan upaya subversi/pembujukan dan netralisasi. Sementara untuk kekuatan politis cukup dilakukan netralisasi. Khususnya angkatan bersenjata, postur dan kekuatan angkatan bersenjata suatu negara merupakan sangkur bermata dua bagi perencana kudeta; bisa menguntungkan maupun merugikan. Dalam angkatan bersenjata di era modern yang sangat kompleks, perencana kudeta harus dapat menyusup ke dalam sistem tersebut dan membujuk sebagian unit agar bersedia bergabung dalam kudeta, serta menetralsisir unit lainnya - agar tidak menyulitkan di kemudian hari, baik di hari "H" kudeta maupun di waktu-waktu berikutnya. Hal

⁹ *Ibid.*, hlm. 96.

penting disini adalah bahwa perencana kudeta tidak boleh mengabaikan kekuatan yang berpotensi mengintervensi di kemudian hari.¹⁰

Terdapat tiga faktor kunci yang menentukan keberhasilan campur tangan (kudeta) oleh militer. *Pertama* adalah keterlibatan perwira menengah yang menduduki pos-pos strategis, seperti satuan infanteri dan pasukan kavaleri lapis baja - penting sebagai *deterrent factor* (membuat lawan menjadi gentar). *Kedua*, harus memiliki pasukan yang adekuat untuk menaklukkan penentang utama kudeta dan obyek vital strategis. Dan *ketiga* adalah ketepatan koordinasi, kudeta yang tidak dijalankan secara tepat dan diselaraskan dengan baik akan menemui kegagalan.¹¹

3.3 Metode Penelitian

Dalam disiplin ilmu sejarah, terdapat empat tahapan yang prinsipal dalam metode sejarah. Keempatnya adalah heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi dan historiografi¹². Tahapan heuristik termasuk kompleks karena terdapat sejumlah hal yang perlu dipahami sejarawan tentang sumber sejarah. Berdasarkan klasifikasinya, sumber sejarah dibagi menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian langsung atas peristiwa sejarah. Definisi kesaksian langsung ini cukup luas pengertiannya, diantaranya kesaksian dari pelaku atau saksi sejarah baik tertulis maupun lisan. Sumber primer dapat pula berupa rekaman peristiwa melalui peralatan perekam yang ada di tempat dan di saat peristiwa terjadi. Sumber primer tidak harus manuskrip/data dalam format dan wujud yang asli, namun dapat pula berupa versi *copy* dari sumber asli.

Adapun sumber sekunder adalah kesaksian dari siapa saja yang bukan merupakan saksi mata peristiwa sejarah. Dalam hal ini, saksi tidak terlibat

¹⁰ Edward Luttwak, *Teori dan Praktek Penggulingan Kekuasaan* (Yogyakarta: Relief, 2009), hlm. 69-80.

¹¹ Eric Nordlinger, *op.cit*, hlm. 148-153.

¹² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 90.

langsung dalam peristiwa yang dikisahkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh sumber sekunder dapat ditemui dalam wujud buku, jurnal, dan artikel.

Berdasarkan jenisnya, sumber sejarah dibedakan dalam sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Sumber tertulis dapat berupa rekaman sezaman, surat kabar, majalah dan sebagainya. Sumber tidak tertulis dapat berupa artefak, foto, video, rekaman suara, informasi lisan dan lain sebagainya.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan sumber primer berupa rekaman gambar gerak (video) yang merekam situasi di Filipina saat terjadi kudeta. Rekaman didapat penulis melalui laman penyedia video, *YouTube*. Selain itu penulis juga menggunakan media foto yang diambil pada saat peristiwa kudeta. Penggunaan sumber foto disamping memperkaya kisah sejarah, juga dapat membuka dan menawarkan topik baru untuk penelitian sejarah.¹³ Sumber berupa foto ini didapat dari sejumlah laman yang diakses melalui internet.

Salah satu kelebihan foto adalah dapat memuat berbagai unsur kehidupan yang dapat dinarasikan secara lebih detail untuk menghasilkan paparan masa silam yang komprehensif. Bambang Purwanto menyatakan bahwa gambaran kehidupan sehari-hari lebih mudah ditemukan dalam bentuk visual.¹⁴ Dalam studi ini, penulis berupaya menganalisis unsur kehidupan sosial budaya, khususnya yang melibatkan personel militer Filipina melalui foto. Sebuah foto yang memuat gambar personel militer dapat mengisahkan banyak hal mulai dari jenis senjata yang digunakan, perlengkapan tempur, seragam dan sebagainya.

Penulis menggunakan sumber primer berupa terbitan sezaman, dalam hal ini artikel-artikel yang dimuat dalam majalah bulanan *Tempo* menjadi pilihan. Alasan penulis memilih *Tempo* adalah keterjangkauan sumber, dimana majalah *Tempo* edisi 1980-an tersedia dan dapat diakses di Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan (UPT) Universitas Jember. Selain majalah *Tempo*, penulis juga

¹³ Jean Gelman Taylor, "Aceh: Narasi foto, 1873-1930" dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, Ratna Saptari (Editor), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 321.

¹⁴ Bambang Purwanto, "Menulis Kehidupan Sehari-hari Jakarta" dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, Ratna Saptari (Editor), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 250.

menggunakan sumber elektronik, berupa berita sezaman dari kantor berita *New York Times* dan *Los Angeles Times* yang telah didigitalisasi oleh pengelolanya. Hasil digitalisasi ini, dalam arti isi berita adalah sama persis dengan yang diterbitkan pada dekade 1980-an. Perkembangan baru dalam pengarsipan berita seperti ini sangat membantu mahasiswa Ilmu Sejarah dalam memperoleh salinan koran lama secara murah namun dengan isi yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya bagi yang berminat dengan kajian sejarah luar negeri.

Perkembangan teknologi dalam wujud internet yang memungkinkan menghadirkan sumber informasi alternatif, juga penulis manfaatkan dalam penulisan skripsi ini. Sumber internet memiliki kelebihan dalam hal kemudahan akses dan biaya, namun memerlukan ketelitian dan kejelian dalam memilih dan memilah referensi yang kredibel. Penulis membatasi pemakaian sumber internet pada laman yang dapat dipercaya, diantaranya laman resmi pemerintah Filipina, laman penyedia layanan buku elektronik karya cendekiawan yang kompeten, dan laman lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya.

Penulis juga menggunakan jurnal ilmiah untuk mempertajam analisis dan memperoleh perbandingan pendapat dari para cendekiawan yang kompeten di bidangnya. Jurnal yang digunakan adalah *Kasarinlan*. Selain jurnal, juga digunakan buku-buku yang memiliki relevansi dengan peristiwa kudeta maupun situasi pra-kudeta. Jurnal ilmiah didapatkan secara daring dari beberapa laman penyedia jurnal, hal ini merupakan salah satu dampak kemajuan teknologi informasi yang positif dan memudahkan mahasiswa dalam mengakses karya ilmiah yang komprehensif dengan biaya yang tidak begitu tinggi. Sumber lain yang digunakan penulis adalah buku-buku yang relevan. Buku yang digunakan merupakan koleksi pribadi penulis, koleksi UPT Perpustakaan Universitas Jember, dan sumber-sumber pinjam pakai dari koleksi rekan-rekan yang memiliki kesamaan minat dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan.

Tahapan kedua dalam penulisan sejarah adalah kritik sumber. Pada intinya, kritik sumber adalah menguji validasi sumber yang telah dihimpun.¹⁵ Garaghan menyatakan bahwa kritik sumber melibatkan proses yang kompleks,

¹⁵ Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 65.

menurutnya terdapat enam pertanyaan yang perlu “diujikan” terhadap masing-masing dan keseluruhan sumber:¹⁶

1. *When was the source, written or unwritten, produced (date)?*
2. *Where was it produced (localization)?*
3. *By whom was it produced (authorship)?*
4. *From what pre-existing material was it produced (analysis)?*
5. *In what original form was it produced (integrity)?*
6. *What is the evidential value of its contents (credibility)?*

Poin nomor 1 hingga 3 dapat dianalisis dari data publikasi sumber yang bersangkutan. Setiap tulisan yang baik memiliki data publikasi yang lengkap. Hal tersebut dapat digunakan untuk menguji kredibilitas sumber. Untuk sumber tidak tertulis, seperti foto dan video, beberapa mungkin tidak memiliki data publikasi yang lengkap. Untuk menguji kredibilitas sumber semacam ini dapat digunakan metode periksa silang (*cross check*) melalui internet, sebagai upaya yang efektif. Dengan mengunggah gambar pada mesin pencari dapat ditemukan keterangan yang relatif lengkap mengenai gambar/foto tersebut. Sedangkan untuk video, pada laman yang memuat video tersebut biasanya dicantumkan keterangan penunjang. Adapun untuk poin 4 hingga 6, dapat disesuaikan dengan keadaan masing-masing sumber yang digunakan.

Kritik sumber terbagi menjadi dua, yakni kritik eksternal dan kritik internal. Keduanya saling melengkapi dan merupakan kesatuan integral dalam tahapan penulisan sejarah. Kritik eksternal digunakan untuk menguji keaslian sumber, sedangkan kritik internal digunakan untuk menguji kredibilitas dan reliabilitas sumber.¹⁷

Setelah sumber sejarah dikritisi, maka tahapan berikutnya adalah interpretasi. Kuntowijoyo secara cermat membagi interpretasi menjadi dua bagian, yakni analisis dan sintesis. Pada prinsipnya analisis adalah upaya menemukan fakta dari sumber-sumber yang telah terkumpul. Sedangkan sintesis adalah menyatukan data-data yang ada untuk menemukan fakta tentang suatu peristiwa

¹⁶ Gilbert J. Garaghan, *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1946), hlm. 168.

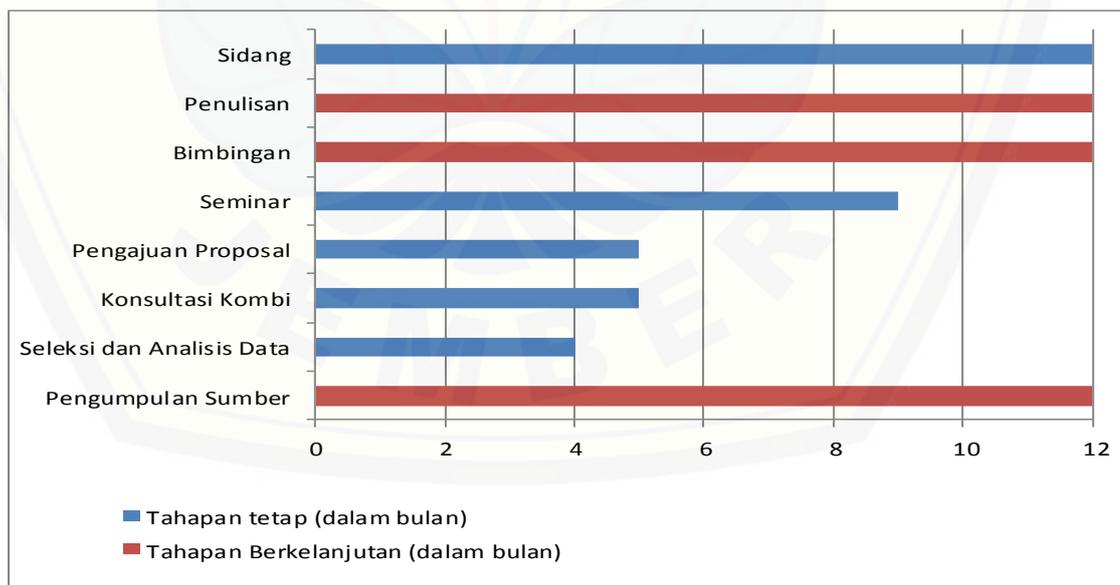
¹⁷ Daliman, *op.cit.*, hlm. 66.

sejarah.¹⁸ Upaya analisis dilakukan terhadap sumber-sumber yang memuat data tentang hubungan sipil-militer di Filipina agar penulis dapat menemukan faktor-faktor pendorong terjadinya kudeta. Selanjutnya data yang diperoleh disatukan untuk menemukan fakta tentang peristiwa serta dampak yang ditimbulkan dari kudeta tahun 1986-1990.

Tahapan terakhir adalah penulisan sejarah atau historiografi. Dalam penulisan skripsi ini digunakan model deskriptif analitis. Menurut Daliman, penulisan deskriptif digunakan untuk menggambarkan bentuk kelembagaan atau struktur kehidupan masyarakat dalam periode tertentu. Sementara analitik mengutamakan menampilkan analisis suatu masalah dengan menghadirkan bukti sejarah yang berhasil dihimpun dan menampilkannya melalui argumen rasional.¹⁹ Metode deskriptif analitis lazim digunakan dalam penulisan sejarah modern guna menghasilkan karya sejarah yang komprehensif. Metode ini menggunakan pendekatan ilmu sosial yang sesuai sebagai ilmu bantu guna menganalisis peristiwa sejarah.

Gambar 1.1

Bagan Penulisan Skripsi Menurut Waktu



¹⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 90.

¹⁹ Daliman, *op.cit.*, hlm. 108-109.

Keterangan :

1. Tahapan tetap adalah tahapan dalam penulisan skripsi yang dilalui hanya satu kali, sesuai prosedur tugas akhir.

Tahapan berkelanjutan adalah tahapan dalam penulisan skripsi yang berlangsung terus-menerus demi kesempurnaan skripsi. Termasuk dalam tahapan ini antara lain pengumpulan sumber, bimbingan dan penulisan/penyuntingan.

3.4 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan. Berisi subbab-subbab Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Ruang Lingkup Penelitian, Tinjauan Pustaka, Pendekatan dan Kerangka Teoretis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 Faktor Pendorong Timbulnya Kudeta. Bagian ini membahas faktor-faktor yang dapat menyebabkan kudeta di Filipina meletus. Untuk menghasilkan penulisan yang komprehensif, penulis menganalisis sejumlah permasalahan yang dibagi dalam subbab sebagai berikut:

- 2.1 Karakteristik Militer Filipina

Subbab ini membahas karakteristik korps perwira militer Filipina dan alasan mengapa mereka dapat terlibat dalam upaya kudeta.

- Hubungan Sipil-Militer di Filipina

Subbab ini membahas hubungan sipil-militer di Filipina di masa silam guna menemukan benang merah antara peristiwa kudeta di masa Corazón Aquino dengan kebijakan otoritas sipil. Uraian dalam subbab ini dibagi dua, yakni:

2.2.1 Terbentuknya Angkatan Bersenjata Filipina

2.2.2 Menanggulangi Pemberontakan Dalam Negeri

- 2.3 Keadaan Militer Filipina Pada Masa Pemerintahan Ferdinand Marcos
Rejim Marcos yang berkuasa sejak 1965 hingga 1986 dipandang bertanggungjawab terhadap dekadensi moral juang militer Filipina. Keadaan tersebut menghasilkan ketidakpuasan sebagian pihak militer yang akhirnya memuncak pada masa Corazón Aquino. Terdapat dua pokok bahasan dalam subbab ini yang dipandang krusial dalam menggambarkan kondisi militer Filipina dibawah pemerintahan Marcos, yaitu:

2.3.1 Undang Undang Darurat Perang Tahun 1972

2.3.2 Penyalahgunaan Fungsi Militer

Bab 3 Jalannya Kudeta Tahun 1986-1990 berisi pembahasan sembilan kudeta yang terjadi di Filipina dalam rentang waktu tahun 1986-1990. Subbab dalam bab 3 meliputi:

- 3.1 Jatuhnya Ferdinand Marcos dan Naiknya Corazón Aquino
Pembahasan di subbab ini dimulai saat Corazón Aquino menduduki kursi kepresidenan dan menghadapi permasalahan yang ditinggalkan rejim Marcos. Fokus utama uraian di bab ini adalah kebijakan Cory Aquino yang berhubungan dengan masalah pertahanan dan keamanan, yang terkait erat dengan AFP sebagai institusi militer Filipina.
- 3.2 Faktor Eksternal dan Internal
Bagian ini membahas faktor eksternal dan internal yang menyebabkan militer berontak kepada pemerintah yang semestinya mereka lindungi. Faktor eksternal diwakili melalui pembahasan 3.2.1 Sikap Corazón Aquino terhadap Militer. Sedangkan faktor internal diuraikan dalam bagian 3.2.2 Permasalahan Internal Militer Filipina.
- 3.3 Kronologi Kudeta
Bagian ini terdiri atas sub-subbab yang masing-masing berisi satu bahasan kudeta.
 - 3.3.1 Plot Hotel Manila (6 Juli 1986)
 - 3.3.2 Plot God Save the Queen (11 November 1986)
 - 3.3.3 Peristiwa GMA-7 (22-27 Januari 1987)
 - 3.3.4 Peristiwa Black Saturday (18 April 1987)
 - 3.3.5 Plot MIA/Manila International Airport (Juli 1987)
 - 3.3.6 Kudeta Agustus 1987 (28 Agustus 1987)
 - 3.3.7 Kudeta Desember 1989 (1-7 Desember 1989)
 - 3.3.8 Kudeta Maret 1990 (4 Maret 1990)
 - 3.3.9 Kudeta Oktober 1990 (4 Oktober 1990)